

## ANALISIS PERBANDINGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KERINCI DAN KOTA SUNGAI PENUH

AFDHAL CHATRA<sup>1</sup>, ARGASUWITRA<sup>2</sup>  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sakti Alam Kerinci<sup>1,2</sup>  
[afdhalchatra@gmail.com](mailto:afdhalchatra@gmail.com)

### ABSTRACT

*This study is a descriptive analysis of financial capability in the city area in the city of Bitung and supports the implementation of regional autonomy. The data used in this analysis in Sungai Penuh City and Kerinci Region budget data from 2010 to 2014 primarily to. Analysis tools used in this study elapsed areas of financial self-sufficiency ratio, ratio of the degree of fiscal decentralization of routineability index ratio, Growth Ratio. The results showed an average yield of local financial independence ratio of 5% Kerinci district and River City Full of 4%, value ranges between 0% s / d 25%, with the regional financial capability criteria low. the degree of fiscal decentralization Kerinci district and River City Full views of the data analysis Ratio regional revenue is still very small because only the range below 10%. The degree of fiscal decentralization  $\leq 10\%$  indicated that the ability of local finance is very less. The average growth rate Kerinci amounted to 21.49%, and the average growth rate Kerinci amounted to 42.60%.*

**Keywords** : *The Ratio Of Local Financial Independence, The Degree Of Fiscal Decentralization Rate, Growth Rate*

### ABSTRAK

*Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif tentang kemampuan keuangan daerah di kota Sungai Penuh dan kabupaten Kerinci dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Data yang digunakan dalam analisis ini adalah data APBD kota Sungai Penuh dan kabupaten Kerinci Tahun 2010 sampai dengan 2014. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini Rasio kemandirian keuangan daerah, Rasio derajat desentralisasi fiskal dan Rasio Rasio Pertumbuhan. Hasil penelitian menunjukkan hasil rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kerinci sebesar 5% dan Kota Sungai Penuh sebesar 4%, nilainya berkisar antara 0% s/d 25%, dengan kriteria kemampuan keuangan daerahnya rendah sekali. derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh dilihat dari analisis data Rasio Pendapatan Asli Daerah masih sangat kecil karena hanya berkisar di bawah 10%. Derajat desentralisasi fiskal yang  $\leq 10\%$  menunjukkan bahwa kemampuan keuangan daerah yang sangat kurang. Rata-rata rasio pertumbuhan Kabupaten Kerinci adalah sebesar 21,49%, kemudian rata-rata rasio pertumbuhan Kabupaten Kerinci adalah sebesar 42,60%.*

**Kata kunci** : *Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Pertumbuhan*

---

*Detail Artikel :*

*Diterima : 21 September 2016*

*Disetujui : 05 Oktober 2016*

*DOI : <http://dx.doi.org/10.22216/jbe.v1i3.952>*

---

## PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan suatu langkah awal menuju pembangunan ekonomi nasional yang lebih berdaya tumbuh tinggi dengan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat di daerah. Asas yang menjadi prinsip dasar otonomi adalah otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab. Prinsip ini memperhatikan aspek demokrasi, partisipasi, adil dan merata dengan tetap memperhatikan potensi dan keragaman daerah. Berdasarkan asas tersebut, diharapkan otonomi daerah mampu mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat daerah.

Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa: kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan; kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya; hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan. Dengan pengaturan tersebut pada dasarnya pemerintah menerapkan prinsip *money follow function*/uang mengikuti fungsi.

Dengan adanya otonomi daerah, kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan semakin besar sehingga tanggung jawab yang diembannya akan bertambah banyak. Implikasi dari adanya kewenangan urusan pemerintahan yang begitu luas yang diberikan kepada daerah dalam rangka otonomi daerah dapat menjadi suatu berkah bagi daerah. Namun disisi lain bertambahnya kewenangan daerah tersebut juga merupakan beban yang menuntut kesiapan daerah untuk pelaksanaannya, karena semakin besar urusan pemerintah yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Oleh karena itu ada beberapa aspek yang harus dipersiapkan antara lain sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sarana dan pra sarana daerah. Aspek keuangan merupakan salah satu dasar kriteria untuk dapat mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Kemampuan daerah yang dimaksud adalah sampai sejauh mana daerah dapat menggali sumber-sumber keuangan sendiri guna membiayai kebutuhan keuangan daerah tanpa harus menggantungkan diri pada bantuan dan subsidi dari pemerintah pusat.

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan tercermin dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan, serta pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Salah satu ciri utama daerah mampu dalam melaksanakan otonomi daerah menurut Yulianti (2001) adalah terletak pada kemampuan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya dengan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat mempunyai proporsi yang semakin mengecil dan diharapkan bahwa PAD harus menjadi bagian terbesar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan roda pemerintahan suatu daerah yang berdasar pada prinsip otonomi yang nyata, luas dan bertanggung jawab. Peranan Pendapatan Asli Daerah dalam keuangan daerah menjadi salah satu tolak ukur penting dalam pelaksanaan otonomi daerah, dalam arti semakin besar suatu daerah memperoleh dan menghimpun PAD maka akan semakin besar pula tersedianya jumlah keuangan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah. keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kemampuan suatu daerah dalam bidang keuangan. Aspek keuangan merupakan salah satu dasar kriteria untuk dapat mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Kemampuan daerah yang dimaksud adalah sampai sejauh mana daerah dapat menggali sumber-sumber keuangan sendiri guna membiayai kebutuhan keuangan daerahnya tanpa harus menggantungkan diri pada bantuan dana dari pemerintah pusat/pemerintah daerah yang lebih tinggi.

Untuk itulah, peranan data keuangan daerah sangat dibutuhkan guna mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan daerah serta jenis dan besar belanja yang harus dikeluarkan agar perencanaan keuangan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Data keuangan daerah yang memberikan gambaran statistik perkembangan anggaran dan realisasi, baik penerimaan maupun pengeluaran dan analisa terhadapnya merupakan informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dan melihat kemampuan atau tingkat kemandirian daerah.

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya rasio kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh tahun 2010-2014.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya rasio derajat desentralisasi fiskal di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh tahun 2010-2014
3. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh tahun 2010-2014.
- 4.

#### METODE PENELITIAN

Menurut Widodo dalam Halim (2002 : 126) analisa yang digunakan pada analisis kinerja keuangan daerah dalam bentuk rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD adalah sebagai berikut :

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian

$$= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Propinsi}} \times 100$$

Tolak ukur rasio kemandirian keuangan daerah dapat dijelaskan dengan menggunakan skala Interval Rasio Kemandirian Keuangan Daerah seperti dalam tabel 1:

Tabel 1  
Skala Interval Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan Daerah	RKKD	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% s/d 25%	Instruktif
Rendah	25% s/d 50%	Konsultatif
Sedang	50% s/d 75%	Partisipatif
Tinggi	75% s/d 100%	Delegatif

Sumber : Wulandari (2001)

Jika, RKKD (Rasio Kemandirian Keuangan Daerah) menurun maka, hal ini menunjukkan kemandirian keuangan daerah cenderung menurun walaupun PAD meningkat sebab, peningkatannya lebih lambat dibandingkan dengan peningkatan bantuan dan sumbangan. Semakin sedikit sumbangan dari pusat, semakin tinggi derajat kemandirian suatu daerah yang menunjukkan bahwa daerah tersebut semakin mampu membiayai pengeluarannya sendiri tanpa bantuan dari pemerintah pusat.

Adapun Pola hubungan keuangan daerah tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- 1) Pola Hubungan Instruktif: peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
- 2) Pola Hubungan Konsultatif: campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi.

- 3) Pola Hubungan Partisipatif: peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.
- 4) Pola Hubungan Delegatif: campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada, karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah

## 2. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat Desentralisasi Fiskal, khususnya komponen PAD dibandingkan dengan TPD, Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Rumus yang digunakan adalah :

$$DDF = \frac{PAD_t}{TPD_t} \times 100\%$$

Keterangan :

DDF : Derajat Desentralisasi Fiskal

PAD<sub>t</sub> : Total PAD Tahun t

TPD<sub>t</sub> : Total Pendapatan Daerah Tahun t

Tabel 2  
Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal

%	Kemampuan Keuangan Daerah
0,00-10,00	Sangat Kurang
10,01-20,00	Kurang
20,01-30,00	Cukup
30,01-40,00	Sedang
40,01-50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber : Wulandari (2001: 20)

## 3. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

$$\text{Rasio Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan } \Sigma \text{ Pendapatan } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Penerimaan } \Sigma \text{ Pendapatan } X_{n-1}} \times 100\%$$

Rasio pertumbuhan (*Growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Rasio Kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan propinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Tabel 3 berikut ini menampilkan rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kerinci yakni sebagai berikut :

Tabel 3  
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2010 – 2014

No	Tahun	PAD (Rupiah)	Dana Transfer Pusat/Provinsi (Rupiah)	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (%)	Kriteria Penilaian (Pola Hubungan)
1	2010	22.883.018.741,39	521.290.000.000	4,39%	Instruktif
2	2011	31.537.153.761,39	693.462.000.000	4,55%	Instruktif
3	2012	33.388.190.930,00	752.930.000.000	4,43%	Instruktif
4	2013	40.783.693.656,00	855.222.000.000	4,77%	Instruktif
5	2014	48.986.957.919,00	924.523.000.000	5,30%	Instruktif
	JUMLAH	177.579.015.007,78	3.747.427.000.000	23%	-
	Rata-rata	35.515.803.001,56	749.485.400.000	5%	Instruktif

Sumber : *Data Diolah Tahun 2016*

Berdasarkan tabel 3 maka dapat dilihat hasil perhitungan rasio kemandirian daerah yang menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Dimulai dari tahun anggaran 2010 sampai dengan tahun anggaran 2014, persentase perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kerinci masih kurang stabil karena masih mengalami naik turun terhadap hasil perhitungan persentasenya.

Persentase rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kerinci diawali dari tahun anggaran 2010 dimana persentasenya adalah 4,39% yang kemudian mengalami kenaikan pada tahun anggaran 2011 yaitu menjadi 4,55% dan mengalami penurunan pada tahun anggaran 2012 yakni 4,43%, namun pada tahun anggaran 2013 naik menjadi 4,77% tapi pada tahun 2014 kembali mengalami kenaikan menjadi 5,30%.

Berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat disimpulkan rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kerinci adalah sebesar 5% dengan kriteria pola hubungan instruktif.

Tabel 4 berikut ini menampilkan rasio kemandirian keuangan daerah Kota Sungai Penuh yakni sebagai berikut

Tabel 4  
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 – 2014

No	Tahun	PAD (Rupiah)	Dana Transfer Pusat/Provinsi (Rupiah)	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (%)	Kriteria Penilaian (Pola Hubungan)
1	2010	8.289.955.374,95	357.940.086.689	2,32%	Instruktif
2	2011	14.356.365.035,90	437.597.490.692	3,28%	Instruktif
3	2012	19.705.802.061,54	452.625.807.566	4,35%	Instruktif
4	2013	24.266.664.871,03	533.149.654.903	4,55%	Instruktif
5	2014	33.199.858.218,30	565.064.371.432	5,88%	Instruktif
	Jumlah	99.818.645.561,72	2.346.377.411.282	20%	-
	Rata-rata	19.963.729.112,34	469.275.482.256	4%	Instruktif

Sumber : *Data diolah Tahun 2016*

Berdasarkan tabel 4 di atas rasio kemandirian keuangan daerah Kota Sungai Penuh, walaupun persentasenya sangat rendah dan di bawah Kabupaten Kerinci, namun persentase rasio kemandirian keuangan daerahnya selalu mengalami peningkatan. Selanjutnya persentase rasio kemandirian keuangan daerah Kota Sungai Penuh diawali dari tahun anggaran 2010 dimana persentasenya adalah 2,32% yang kemudian mengalami kenaikan pada tahun anggaran 2011 yaitu menjadi 3,28% dan mengalami kenaikan kembali pula pada tahun anggaran 2012 yakni 4,35%, pada tahun anggaran 2013 juga naik menjadi 4,55% dan pada tahun 2014 kembali mengalami kenaikan menjadi 5,88%. Berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat disimpulkan rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kerinci adalah sebesar 4% dengan kriteria pola hubungan instruktif.

Adapun Pola hubungan keuangan daerah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh dapat diinterpretasikan sebagai “Pola Hubungan Instruktif”, dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah, hal ini dapat dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh dari tahun 2010 s/d 2014 nilainya berkisar antara 0% s/d 25%, dengan kriteria kemampuan keuangan daerahnya rendah sekali.

#### Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat Desentralisasi Fiskal atau otonomi Fiskal Daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai pembangunan. Derajat Desentralisasi Fiskal, khususnya komponen PAD dibandingkan dengan TPD.

Tabel 5 menampilkan rasio derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Kerinci yakni sebagai berikut :

Tabel 5  
Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Kerinci Tahun 2010-2014

No	Tahun	PAD (Rupiah)	Pendapatan Daerah (Rupiah)	Derajat Desentralisasi Fiskal (%)
1	2010	22.883.018.741,39	547.104.000.000	4,18
2	2011	31.537.153.761,39	696.130.000.000	4,53
3	2012	33.388.190.930,00	761.821.000.000	4,38
4	2013	40.783.693.656,00	904.379.000.000	4,51
5	2014	48.986.957.919,00	943.212.000.000	5,19

Sumber : *Data Diolah Tahun 2016*

Hasil perhitungan derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Kerinci dapat dilihat dari analisis data Rasio Pendapatan Asli Daerah masih sangat kecil karena hanya berkisar di bawah 10%. Derajat desentralisasi fiskal yang  $\leq 10\%$  menunjukkan bahwa kemampuan keuangan daerah yang sangat kurang. Oleh karena itu pemerintah daerah Kabupaten Kerinci memiliki kemampuan keuangan daerah yang sangat rendah sehingga peranan pemerintah pusat sangat besar dalam membantu keuangan daerahnya agar pembiayaan pembangunan bisa terlaksana.

Dari hasil tabel 5 dapat dilihat bahwa kemampuan keuangan daerah di Kabupaten Kerinci dari tahun 2010-2014 masih tergolong sangat kurang. Hal ini terjadi karena kontribusi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerahnya kecil.

Hal ini yang menyebabkan daerah Kabupaten Kerinci mengalami stagnasi kreativitas dan terhambatnya pengembangan potensi yang dimiliki daerah, sehingga proses pembangunan dan kehidupan tidak berjalan dengan lancar.

Tabel 6  
Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Sungai Penuh Tahun 2010-2014

No	Tahun	PAD (Rupiah)	Pendapatan Daerah (Rupiah)	Derajat Desentralisasi Fiskal (%)
1	2010	8.289.955.374,95	375.248.000.000	2,21
2	2011	14.356.365.035,90	495.649.000.000	2,90
3	2012	19.705.802.061,54	499.080.000.000	3,95
4	2013	24.266.664.871,03	622.752.000.000	3,90
5	2014	33.199.858.218,30	653.291.000.000	5,08

Sumber : Data diolah Tahun 2016

Dari hasil tabel 6 dapat dilihat bahwa kemampuan keuangan daerah di Kota Sungai Penuh dari tahun 2010-2014 masih tergolong sangat kurang. Derajat desentralisasi fiskal Kota Sungai Penuh dapat dilihat dari analisis data Rasio Pendapatan Asli Daerah masih sangat kecil karena hanya berkisar di bawah 10%. Derajat desentralisasi fiskal yang  $\leq 10\%$  menunjukkan bahwa kemampuan keuangan daerah yang sangat kurang. Hal ini terjadi karena kontribusi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerahnya kecil. Hal ini yang menyebabkan daerah Kota Sungai Penuh mengalami stagnasi kreativitas dan terhambatnya pengembangan potensi yang dimiliki daerah, sehingga proses pembangunan dan kehidupan tidak berjalan dengan lancar

#### Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

Rasio pertumbuhan (*Growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapat perhatian.

Tabel 7 berikut ini menampilkan rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kerinci yakni sebagai berikut :

Tabel 7  
Rasio Pertumbuhan PAD Kabupaten Kerinci Tahun 2010-2014

No	Tahun	PAD (Rupiah)	Pertumbuhan (%)
1	2010	22.883.018.741,39	-
2	2011	31.537.153.761,39	37,82
3	2012	33.388.190.930,00	5,87
4	2013	40.783.693.656,00	22,15
5	2014	48.986.957.919,00	20,11
	Jumlah	177.579.015.007,78	85,95
	Rata-rata	35.515.803.001,56	21,49

Sumber : Data diolah tahun 2016

Dari tabel 7 di atas dapat dilihat bahwa rasio pertumbuhan PAD Kabupaten Kerinci tahun 2011 adalah sebesar 37,82%, kemudian pada tahun 2012 turun menjadi 5,87%, pada tahun berikutnya 2013 naik kembali menjadi 22,15% dan pada tahun 2014 kembali mengalami penurunan menjadi 20,11%. Hal ini berarti bahwa rasio pertumbuhan PAD Kabupaten Kerinci dari tahun 2010-2014 mengalami fluktuasi, dimana pemerintah daerah Kabupaten Kerinci dinilai tidak konsisten dalam mempertahankan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Rata-rata rasio pertumbuhan Kabupaten Kerinci adalah sebesar 21,49%.

Tabel 8  
Rasio Pertumbuhan PAD Kota Sungai Penuh Tahun 2010-2014

No	Tahun	PAD (Rupiah)	Pertumbuhan (%)
1	2010	8.289.955.374,95	-
2	2011	14.356.365.035,90	73,18
3	2012	19.705.802.061,54	37,26
4	2013	24.266.664.871,03	23,14
5	2014	33.199.858.218,30	36,81
	Jumlah	99.818.645.561,72	170,39
	Rata-rata	19.963.729.112,34	42,60

Sumber : *Data diolah tahun 2016*

Dari tabel 8 di atas dapat dilihat bahwa rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kota Sungai Penuh tahun 2011 adalah sebesar 73,18%, kemudian pada tahun 2012 turun menjadi 37,26%, pada tahun berikutnya 2013 kembali turun menjadi 23,14% dan pada tahun 2014 kembali mengalami kenaikan menjadi 36,81%. Hal ini berarti bahwa rasio pertumbuhan PAD Kota Sungai Penuh dari tahun 2010-2014 selalu mengalami penurunan, dimana pemerintah Kota Sungai Penuh dinilai tidak mampu mempertahankan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya, bahkan selalu mengalami penurunan. Rata-rata rasio pertumbuhan Kabupaten Kerinci adalah sebesar 42,60%.

## SIMPULAN

Pola hubungan keuangan daerah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh dapat diinterpretasikan sebagai “Pola Hubungan Instruktif”, dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah, hal ini dapat dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh dari tahun 2010 s/d 2014 nilainya berkisar antara 0% s/d 25%, dengan kriteria kemampuan keuangan daerahnya rendah sekali.

Hasil perhitungan derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh dapat dilihat dari analisis data Rasio Pendapatan Asli Daerah masih sangat kecil karena hanya berkisar di bawah 10%. Derajat desentralisasi fiskal yang  $\leq 10\%$  menunjukkan bahwa kemampuan keuangan daerah yang sangat kurang.

Hasil perhitungan rasio pertumbuhan PAD Kabupaten Kerinci dari tahun 2010-2014 mengalami fluktuasi, dimana pemerintah daerah Kabupaten Kerinci dinilai tidak konsisten dalam mempertahankan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya sementara hasil perhitungan rasio pertumbuhan PAD Kota Sungai Penuh dari tahun 2010-2014 selalu mengalami penurunan, dimana pemerintah Kota Sungai Penuh dinilai tidak mampu mempertahankan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Anita Wulandari. 2001. Kemampuan Keuangan Daerah. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik Vol.5 No.2 November*
- Bastian, Indra, 2006, *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, Erlangga, Jakarta.
- Halim, Abdul, Damayanti, Theresia, 2004, *Pengelolaan Keuangan Daerah, Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Mamesah, D, J. 1995. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta: Pustaka Utama
- Mankiw Gregory, 2006 *Pengantar Ekonomi Makro*, Edisi Ketiga, Salemba Empat Jakarta.
- Mardiasmo, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta.
- Muhammad Gade. 2000 *.Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta:Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Mulyanto 2001, *Pengelolaan Keuangan Daerah, Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, Erlangga, Jakarta.
- Ronald, Andreas dan Sarmiyatiningsih, Dwi. 2010. *Analisis Kinerja Keuangan Dan Pertumbuhan Ekonomi Sebelum Dan Sesudah Diberlakukannya Otonomi Daerah Di Kabupaten Kulon Progo*. Jurnal Bisnis dan Ekonomi, Vol. 1, No. 1, Juni 2010.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Cetakan Pertama. Penerbit Ghalia Indonesia: Jakarta
- Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI.
- Yuliati. 2001. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam Menghadapi Otonomi Daerah, *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP YKPN
- ....., *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*.
- ....., *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*.
- ....., *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.